

Media Online	Jateng.tribunnews.com
Tanggal	25 Agustus 2024
Wilayah	Provinsi Jawa Tengah



11 Warga Kedung Jepara Akan Dapat Bantuan Rumah, Dampak Normalisasi SWD

<https://jateng.tribunnews.com/2024/08/25/11-warga-kedung-jepara-akan-dapat-bantuan-rumah-dampak-normalisasi-swd>

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kabupaten Jepara telah mengajukan nama warga Kecamatan Kedung yang terdampak proyek [normalisasi](#) Sungai SWD untuk mendapat bantuan rumah.

Demikian yang disampaikan, Kabid Perumahan Disperkim Jepara, Hening Indrati saat di konfirmasi Tribun Jateng, Sabtu (25/8/2024).

Dia menjelaskan dari data awal yang diusulkan oleh pihak desa dan kecamatan sebenarnya terdapat 23 Kepala Keluarga (KK).

Namun yang disetujui oleh Disperakim Jawa Tengah hanya 11 KK.

Menurutnya untuk mendapat bantuan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Satu di antaranya harus memiliki tanah pribadi yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan hak milik dan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Usulannya ada 23, namun setelah dilakukan verifikasi hanya 11 yang disetujui, karena hanya itu yang memenuhi syarat," kata Hening.

Dia menjelaskan bahwa bantuan itu direncanakan akan diajukan pada tahun anggaran 2025.

Namun berdasarkan informasi yang ia terima dari Disperakim Provinsi Jawa Tengah bantuan tersebut rencananya akan direalisasikan pada tahun ini.

"Hanya saja dari Provinsi ini juga masih menunggu, karena bantuan tersebut masih diusulkan untuk masuk di anggaran perubahan tahun 2024 dan ini masih menunggu persetujuan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah," jelasnya.

Bantuan tersebut nantinya tidak berupa uang namun berupa material senilai Rp 40 juta.

Bantuan dana tersebut ia mengatakan memang tidak bisa diandalkan sepenuhnya untuk membangun rumah.

"Sehingga kemarin dari Disperakim Provinsi sudah mempertanyakan juga kepada calon penerima kalau mereka harus siap juga untuk mempersiapkan dana stimulan," ungkapnya.

Sedangkan untuk 12 calon penerima lainnya yang belum disetujui, ia mengatakan dari pihak provinsi meminta untuk melengkapi persyaratan agar bisa diusulkan di tahun anggaran berikutnya. (Ito)